

## PELATIHAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) UNTUK MEWUJUDKAN KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER DI KOTA KEDIRI

\*Eko Winarti<sup>1</sup>, Martianawati<sup>2</sup>, Dessy Lutfiasari<sup>3</sup>, Fitriana Desi Mujiono<sup>4</sup>

<sup>1,2</sup>Prodi Magister Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Kadiri

<sup>3</sup>Prodi Kebidanan (S1), Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Kadiri

<sup>4</sup>Mahasiswa Prodi Kebidanan (S1), FIK, Universitas Kadiri

Korespondensi: [ekowinarti@unik-kediri.ac.id](mailto:ekowinarti@unik-kediri.ac.id)

### ABSTRACT

*Gender Mainstreaming (PUG) is a strategy to overcome the problem of gender inequality. PUG is a concept, principle and theme of gender equality that starts from planning, budgeting, implementation, monitoring, evaluation and is integrated into development policies, programs and activities. Data from the Kediri City Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning Service (DP3AP2KB) through the PPA task force during the pandemic received 13 reports from the public about violence in the household. The increase in the number of cases of domestic violence in Kediri City has reached 200 percent as a result of the pandemic. The high level of injustice and gender inequality in the City of Kediri in 2021 is due to the low understanding of the community or Regional Apparatus Organizations (OPD) regarding gender mainstreaming. Starting from these problems, we took the initiative to provide gender mainstreaming training to achieve gender equality and justice as an effort to support development programs in the City of Kediri. The training begins with a pre-test and post-test to measure partners' understanding of Gender Mainstreaming. Based on the results of filling out the pre-test and post-test questionnaires, understanding of Gender Mainstreaming increased from those who did not previously understand PUG to understanding, and knowledge of PUG.*

**Keywords:** PUG, Mainstreaming, Gender

### ABSTRAK

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan gender. PUG merupakan konsep, prinsip, dan tema kesetaraan gender yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta diintegrasikan ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Kediri tahun 2020 melalui satgas PPA selama pandemi menerima 13 laporan dari masyarakat tentang kekerasan di dalam rumah tangga. Peningkatan jumlah kasus KDRT di Kota Kediri mencapai 200 persen sebagai dampak pandemi. Masih tingginya ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender di Kota Kediri tahun 2021 disebabkan rendahnya pemahaman masyarakat atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap pengarusutamaan gender. Bermula dari permasalahan tersebut kami berinisiatif untuk memberikan pelatihan pengarusutamaan gender untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender sebagai upaya mendukung program pembangunan di Kota Kediri. Pemberian pelatihan diawali dengan *pre-test* dan *post-test* guna melakukan pengukuran terhadap pemahaman mitra mengenai Pengarusutamaan Gender. Berdasarkan hasil pengisian kuesioner *pre-test* dan *post-test*, pemahaman mengenai PUG meningkat dari yang sebelumnya belum memahami mengenai PUG menjadi paham, dan adanya pengetahuan mengenai PUG.

**Kata Kunci:** PUG, Pengarusutamaan, Gender

## PENDAHULUAN

Sejak era Presiden Soekarno, Indonesia telah menunjukkan kepedulian terhadap perempuan. Hal ini ditandai dengan partisipasi perempuan dalam pemilihan umum pertama negara itu pada tahun 1955. Selama masa pemerintahan Presiden Sukarno, upah yang setara untuk pekerja laki-laki dan perempuan juga diumumkan (Kusumawardhani, F. Harsini. Naution, 2021). Begitu juga, pada masa Presiden Soeharto, Kementerian Pemuda untuk Peran Perempuan dalam Kabinet Pembangunan didirikan pada tahun 1974, ada kemajuan yang dicapai sebagai bentuk kepedulian terhadap perempuan. Puncaknya terjadi pada masa Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) yaitu dikelurkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional (Kusumawardhani, F. Harsini. Naution, 2021).

Konsep gender yang dikaitkan dengan jenis kelamin sosial yang membedakan laki-laki dan perempuan bukan atas dasar perbedaan biologis, tetapi atas dasar hubungan sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Haspels dan Suriyasarn (2005) mendefinisikan gender sebagai variabel sosial untuk menganalisis perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kaitannya dengan peran, tanggung jawab dan kebutuhan serta peluang dan hambatan (Indra, 2018)(Kusumawardhani, F. Harsini. Naution, 2021).

Pembangunan nasional bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi atau peningkatan pendapatan per kapita, tetapi juga berarti peningkatan kualitas seluruh warga negara yang memberikan kontribusi penting bagi negara. Upaya pembangunan nasional suatu negara selalu diarahkan kepada seluruh warga negara suatu negara. tanpa memandang jenis kelamin, ras, etnis atau kelompok agama, meskipun sering terjadi pada pelaksanaannya yang membuat upaya ini mengarah pada ketidakadilan, diskriminasi dan ketimpangan sosial di masyarakat.

Pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan yang memberdayakan perempuan, dan pelaksanaannya harus menjadi dasar dari semua kebijakan pembangunan melalui prinsip kesetaraan gender dan keadilan gender. Pembangunan kualitas hidup masyarakat terus dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan jenis kelamin tertentu. Keberhasilan pembangunan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat sangat

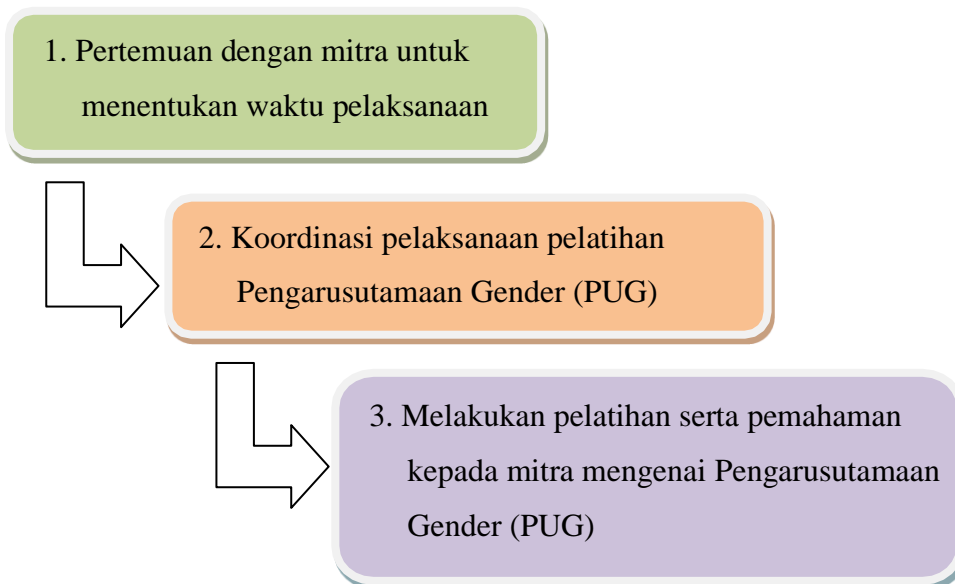
tergantung pada partisipasi laki- laki dan perempuan sebagai aktor sekaligus penerima manfaat dari hasil pembangunan.

Berbagai metode banyak digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Indikator pembangunan manusia (IPM) yang terkait dengan gender dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Selisih antara angka IPM dan angka IPG dapat dimaknai sebagai bias gender dalam pembangunan. Apabila angka IPG lebih kecil dari angka IPM, maka terjadi ketidaksetaraan gender. Selanjutnya untuk melihat sejauh mana tingkat pencapaian dalam pemberdayaan gender dapat diukur dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Pemerintah Kota Sukabumi, 2014) (Jumiati, 2020).

Kebijakan secara formal sangat dibutuhkan ketika mengimplementasikan PUG dalam suatu program pembangunan. Bahkan, PUG memperhitungkan kebutuhan semua gender di masyarakat dan menitikberatkan pada perempuan sebagai bentuk verifikasi agar tidak tertinggal. Stigma sosial seringkali membuat perempuan menjadi warga negara kelas dua. Faktanya, perempuan tidak dapat dinomorduakan semata-mata karena dia seorang perempuan (Afifah, 2021). Bentuk ketidakadilan gender di masyarakat yang sampai saat ini masih terjadi diantaranya: *Stereotype*, Sub ordinasi, Marjinalisasi, Beban ganda (*double burden*), Kekerasan berbasis gender (*gender based violence*) (Jumiati, 2020).

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Kediri, sepanjang 2020 atau selama pandemi, DP3AP2KB melalui satgas PPA menerima 13 laporan dari masyarakat tentang kekerasan di dalam rumah tangga. Data tersebut menunjukkan peningkatan jumlah kasus KDRT di Kota Kediri mencapai hampir 200 persen. Kasus kekerasan dalam rumah tangga ini meliputi kekerasan fisik dan kekerasan psikis yang berlatar belakang ekonomi karena dampak dari pandemi (DP3AP2KB, 2021). Berdasarkan data tersebut dapat diketahui masih tingginya ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender di Kota Kediri tahun 2021. Hal ini dapat disebabkan rendahnya pemahaman masyarakat atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap pengarusutamaan gender.

## METODE PELAKSANAAN



Gambar 1. Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat

Dalam rangka untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi mitra, yaitu masyarakat di Kota Kediri adalah sebagai berikut: (1) Pemberdayaan perempuan melalui PUG, (2) Sosialisasi dengan metode ceramah, diskusi dan bermain peran tentang gender. Pemberian informasi tentang kesehatan, public, layanan reproduksi, tempat pengaduan dan sebagainya, (3) Penjelasan metode *Gender Analysis Pathway (GAP)* dan *Gender Budgeting Statement*, berdasarkan data pilah, kebijakan, program dan kegiatan yang sudah dan belum direncanakan. Selama pelaksanaan pengabdian masyarakat ini, mitra akan menyediakan sumber daya manusia (SDM).

Adapun pelaksanaan kegiatan ini diuraikan dalam gambar berikut:

Tabel 1. Tabel pelaksanaan kegiatan pelatihan Pengarusutamaan Gender (PUG)

NO	KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN
1	Persiapan	Rapat koordinasi dengan Kantor DP3AP2KB Kota Kediri	Surat Ijin Kegiatan Pengabdian dari kantor DP3AP2KB Kota Kediri
		Observasi ulang lokasi setelah proposal lulus seleksi	
		Koordinasi ulang dengan dusun	
		Persiapan bahan dan alat	
2	Pelaksanaan	Identifikasi pemahaman mitra	Data pengetahuan
		Penyuluhan dan pelatihan mitra tentang Pengarusutamaan Gender (PUG)	Terlaksananya kegiatan pelatihan

Tabel 2. Jadwal kegiatan pengabdian masyarakat

Rincian Kegiatan	1	2	3	4
Pengumuman didanai				
Pembelian alat dan bahan : 1) ATK 2) Alat yang digunakan untuk demonstrasi				
Pelaksanaan				
Laporan kemajuan				
Monitoring internal				
Monitoring terpusat				
Laporan akhir				
Seminar dan publikasi				

Kegiatan pengabdian ini seperti yang tertera pada gambar diatas diawali dengan perencanaan dan penyusunan proposal kegiatan hingga pengumuman didanai serta pembelian alat dan bahan untuk demonstrasi pada Minggu pertama, Tahap persiapan pada Minggu pertama dengan uraian kegiatan sebagai berikut: (1) Rapat koordinasi dengan Kantor DP3AP2KB Kota Kediri, (2) Observasi ulang lokasi setelah proposal lulus seleksi, (3) Koordinasi ulang dengan dusun (4) Persiapan alat dan bahan pelatihan. Terbitnya surat ijin kegiatan Pengabdian Masyarakat dari Kantor DP3AP2KB Kota Kediri. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan pada Minggu kedua dan ketiga uraian kegiatannya adalah identifikasi pemahaman mitra untuk mendapatkan data pengetahuan tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan diawali *pre-test*, selanjutnya kegiatan penyuluhan dan pelatihan mitra tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diakhiri dengan *post-test* yang berfungsi untuk mengukur tingkat pengetahuan sebelum maupun setelah diberi penyuluhan dan pelatihan bagi mitra. Laporan kemajuan, monitoring internal, monitoring terpusat dilaksanakan pada Minggu ketiga. Penyusunan laporan akhir dilakukan pada Minggu keempat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan dan pelatihan Pengarusutamaan Gender (PUG) dilakukan pada masyarakat dan OPD di Kota Kediri, kami melakukan kegiatan pada Maret sampai

Juli 2022. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman OPD tentang PUG untuk mendukung kesetaraan dan keadilan gender dalam upaya pembangunan di Kota Kediri. Berikut dokumentasi kegiatan pembukaan pelatihan oleh Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Kediri:



Gambar 2: Pembukaan kegiatan pelatihan

Luaran yang akan dihasilkan ada pada kegiatan pengabdian masyarakat ini, antara lain: (1) Tersusunnya *Gender Analisis Pathway* (GAP) setiap OPD, (2) Tersusunnya *Gender Budget Statement* (GBS), (3) Tersusunnya *Term of Reference* (TOR). Total peserta penyuluhan dan pelatihan Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah 100 orang.

Hasil pengabdian masyarakat yang kami lakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1. Perbandingan nilai pre-test dan post-test**

Kuesioner	Rerata Jawaban Benar
<i>Pre test</i>	55 %
<i>Post test</i>	85%

Sumber: Olah data primer, 2022

Pada hasil *pre-test* didapatkan rerata jawaban benarnya 55%. Melalui hasil *pre-test* ada berbagai pertanyaan yang masih dijawab salah oleh beberapa responden. Responden masih belum banyak memahami terkait pengarusutamaan gender. Setengahnya responden pun tidak memahami terkait pengarusutamaan gender. Saat penyuluhan dan pelatihan diberikan materi dan penjelasan kepada mitra terkait

Pengarusutamaan Gender (PUG). Berikut Dokumentasi kegiatan pelatihan pada kegiatan pengabdian masyarakat ini:



Gambar 3: Pelaksanaan kegiatan pelatihan pada OPD Kota Kediri

Di akhir penyuluhan dan pelatihan diberi *post-test* supaya memahami apakah ada kenaikan pengetahuan responden sesudah diberi pelatihan. Hasil dalam tabel 1, dapat diamati terdapat kenaikan pengetahuan sesudah diberi pelatihan sejumlah 30%. Nilai *post-test* menunjukkan hasil bahwa responden memiliki nilai yang masuk dalam kategori sangat baik yaitu 85%. Kategori hasil *post-test* sangat baik berdasarkan klasifikasi oleh Sugiyono (Sugiyono, 2018). Melalui angka kenaikan pengetahuan ini bermakna bahwa pelatihan pengarusutamaan gender cukup efisien guna memberi peningkatan pengetahuan dan pemahaman responden. Pengetahuan dan pemahaman mengenai pengarusutamaan gender yang telah diperoleh responden bisa memberi manfaat kepada responden dan OPD di Kota Kediri.



Gambar 4: Pelaksanaan kegiatan pelatihan pada OPD Kota Kediri

Berdasarkan sumber referensi tentang PUG, Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), bahwa PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Sehingga hal ini dapat dimaknai bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi, bukan program (Jumiati, 2020). Pengetahuan yang sangat baik mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG) setelah diadakannya pelatihan diharapkan dapat mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender sebagai upaya mendukung program pembangunan di Kota Kediri. Hal ini sejalan dengan tujuan 5 dari SDGs adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan, dan sasaran global sesuai acuan Perpres No.2 Tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019 yang kemudian mengesahkan Perpres No.59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Prasetyawati, 2017).

Agenda SDGs ini sampai tahun 2030 mendatang, namun pemerintah Indonesia sudah mengharmonisasikan dan menyelaraskan jalannya Pembangunan Nasional dengan komitmen global yang telah disepakati bersama terkait dengan pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan berbagai instrument dan upaya dalam mewujudkan PUG (Prasetyawati, 2017). Pelaksanaan PUG ini harus terlebih dahulu



dipahami oleh pimpinan, masyarakat dan OPD sehingga aparatur lainnya akan mengikuti. Apabila penguatan tentang PUG meningkat maka kelak masyarakat dan OPD mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai PUG (Kusumawardhani, F. Harsini. Naution, 2021). Pemahaman yang kurang mengenai PUG maka akan menjadi hambatan dalam pelaksanaan PUG yaitu berdampak pada belum kuatnya reglasi yang mengatur pelaksanaan gender serta lemahnya komitmen pimpinan OPD untuk melaksanakan PUG (Kusumawardhani, F. Harsini. Naution, 2021).

Pelatihan tentang PUG dengan hasil pemahaman sangat baik terhadap PUG diharapkan dapat mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender sebagai upaya mendukung program pembangunan di Kota Kediri melalui berbagai bidang dan inovasi yang melibatkan perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, D. (2021) *Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah Jalan Menuju Kesetaraan, Kementerian Keuangan Jurnal Artikel*. Available at: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-lampung/baca-artikel/14208/Pengarusutamaan-Gender-PUG-adalah-Jalan-Menuju-Kesetaraan.html> (Accessed: 22 May 2022).
- DP3AP2KB (2021) *Selama Pandemi, KDRT di Kota Kediri Meningkat 200 Persen, Radio Andika News*. Available at: <http://www.andikafm.com/news/detail/32458/1>.
- Indra, N.& M. (2018) 'Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Perencanaan Anggaran Responsif Gender', *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, 5(2), pp. 145–162. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/je%20&%20kp.v5i2.423>.
- Jumiati, E. (2020) 'Meningkatkan Peran Perempuan melalui Pengarusutamaan Gender di Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), p. 79.
- Kusumawardhani, F. Harsini. Naution, S.R. (2021) 'Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Di Provinsi Riau Tahun 2020', *Jurnal JAPS*, 2(3), pp. 121–125. Available at: <https://japs.ejournal.unri.ac.id/index.php/JAPS/article/view/66>.
- Pemerintah Kota Sukabumi (2014) *Buku Data Teroilah Gender Kota Sukabumi Tahun 2014*. Sukabumi. Available at: [https://jdih.sukabumikota.go.id/uploads/pdf/PERWAL\\_NO\\_\\_19\\_TAHUN\\_2021\\_TENTANG\\_RENSTRADA\\_DPK2BP3.pdf](https://jdih.sukabumikota.go.id/uploads/pdf/PERWAL_NO__19_TAHUN_2021_TENTANG_RENSTRADA_DPK2BP3.pdf).
- Prasetyawati, N. (2017) 'Perspektif Gender Dalam Pembangunan Nasional Indonesia',

*Prosiding SEMATEKSOS 3 'Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0' [Preprint].*

Sugiyono (2018) *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.  
Available at:  
[https://elibrary.stikesghsby.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=1879&keywords](https://elibrary.stikesghsby.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1879&keywords)  
=.